



Tak Bisa Sembarangan WFH

■ Pastikan Layanan Publik Tetap Terjaga

TUNGGU ARAHAN PUSAT

- Pemda di DIY mempertimbangkan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) seiring kebijakan efisiensi anggaran.
- Namun demikian, penerapan WFH akan dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan dan menunggu arahan dari pusat.
- Keputusan sistem WFH atau WFO perlu mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, termasuk Pemda DIY.
- Sistem ini akan diterapkan, misalnya jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari pusat merosot tajam.
- Penerapan WFH maupun WFA tak bisa dilakukan sembarangan karena dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya.
- Pelayanan pajak misalnya, ada yang masih tatap muka, walau sudah ada layanan berbasis online.
- Kebijakan WFH tersebut bisa dilakukan dengan catatan bisa memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu.

SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mempertimbangkan penerapan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) seiring kebijakan efisiensi anggaran. Sistem ini akan diterapkan, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terutama yang ditransfer dari pusat merosot tajam.

"Kami masih menunggu SE (Surat Edaran) dari Kemendagri. Menghitung pemotongan dana transfer dari pusat. Jika pendapatan APBD menurun drastis, baru mengkaji lebih

● ke halaman 11



Misalnya pelayanan pajak, itu ada yang masih tatap muka, walau kami ada layanan online. Jadi, harus wait and see dulu.

GRAFIS: FAUZIARAHMAN

Tak Bisa

• Sambungan Hal 1

lanjut (terkait WFH)," kata Sekda Kabupaten Sleman, Susanto, Selasa (11/2). Opsi WFH bagi pegawai di lingkungan pemerintah ini menguat sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Hal ini seiring rencana pemerintah pusat yang sedang menggodok aturan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pemda DIY sendiri tengah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan itu dengan harapan dapat melakukan penghematan. Pemerintah Pusat juga rami menerapkan WFH maupun kerja di mana saja (WFA) demi efisiensi karena anggarannya dipotong lebih dari 50 persen.

Sedangkan pemerintah kabupaten, kata Susanto, berbeda dengan pemerintah pusat. Pemkab memberikan layanan langsung kepada masyarakat sedangkan pemerintah pusat memberikan layanan kepada Pemerintah Daerah, lembaga maupun usaha besar.

Kendati demikian, opsi WFH bukan berarti tidak mungkin juga dilakukan di kabupaten selama tidak mengurangi kualitas layanan publik. "Mungkin (diterapkan di kabupaten). Mengikuti kebijakan pusat, selama tidak mengurangi kualitas layanan publik," katanya.

Tunggu arahan
Sementara itu, Pemkab Bantul masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Termasuk dengan ada atau tidaknya penerapan *work from anywhere* (WFA), gerakan hemat listrik, dan air seperti yang kemungkinan dilakukan oleh Pemerintah DIY.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Trisna Marutun mengatakan bahwa penerapan WFA tak bisa dilakukan sembarang. Sistem ini juga harus tergantung dengan karakteristik pekerjaannya.

"Itu harus dipertapkan betul. Misalnya pelayanan pajak, itu ada yang masih tatap muka, walau kami ada layanan *online*. Jadi, harus *wait and see* dulu," ujar Trisna, Selasa (11/2).

Akan tetapi, menurut Trisna, apabila ada efisiensi anggaran yang terlalu dalam, maka tidak menutup kemungkinan bagi Pemkab Bantul bisa menerapkan ke-

bijakan tersebut dengan esatatan bisa memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, kebijakan WFH belum akan diterapkan di Pemkot Yogya. Di samping itu, program-program penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dipastikan tidak terdampak efisiensi anggaran.

"Memang ada program yang harus kita lakukan dengan penghematan. Tapi, tentu bukan pada kegiatan yang wajib mengikat dan program-program yang sangat penting," kata Sugeng, Selasa (11/2).

Sejalan ini, upaya penghematan yang dilakukan oleh pihak Pemkot Yogyakarta dengan menghemat listrik dan air. Upaya tersebut mau tak mau harus ditempuh kas daerah, demi pengurangan ikat pinggang.

Perlu koordinasi
Pemkab Kulon Progo juga menyiapkan skema pembagian WFH dan *work from office* (WFO) untuk para pegawainya. "Kami sedang mengkaji opsi tersebut, namun tetap perlu koordinasi," kata Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, Selasa (11/2).

Menurutnya, keputusan sistem WFH/WFO perlu mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, yang menurut informasi juga sedang mengkaji opsi tersebut.

Jika nantinya opsi tersebut diberlakukan, Triyono meyakini tidak akan banyak kendala. Sebab sistem serupa juga pernah diterapkan saat masa pandemi Covid-19. "Keputusannya menunggu hasil kesepakatan antar pemerintah kabupaten/kota dan Pemda DIY," jelasnya.

Triyono mengatakan, koordinasi terus dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terkait mana saja yang bisa dipangkas. Salah satunya dari alat tulis kantor (ATK), utilitas seperti listrik, hingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan.

Menurutnya, bisa saja penghematan BBM dilakukan dengan mengurangi kendaraan dinas yang digunakan. Misalnya dengan

menggabungkan kepala dan pegawai dalam satu kendaraan dinas jika ada satu kegiatan yang ditangani oleh beberapa OPD.

"Kalau bisa, tidak perlu banyak kendaraan dinas yang digunakan agar penggunaan BBM bisa lebih efisien," ujar Triyono.

la saat ini juga belum bersedia menandatangani usulan perjalanan dinas dari para kepala OPD demi memastikan efisiensi anggaran dipatuhi. Sebab anggaran perjalanan dinas saat ini juga dipangkas hingga 50 persen.

Triyono hanya memberikan izin untuk perjalanan dinas yang bersifat sangat penting atau karena adanya undangan dari pusat. Pemangkas juga berimbas pada anggaran perjalanan dinas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD Kulon Progo karena anggaran perjalanan dinasnya terpaksa dikurangi juga," katanya.

Layanan deteksi gempa
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Novlar Rahmad, angkat bicara terkait dampak efisiensi anggaran yang terjadi di beberapa lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Yang dipangkas itu adalah anggaran-anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Saya yakin bahwa anggaran yang ada di BMKG terkait dengan prediksi cuaca itu masih berjalan," ujar Novlar.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardianto Septiadhi menegaskan bahwa meskipun anggaran untuk pemeliharaan alat-alat deteksi bencana dipangkas hingga 71 persen, layanan operasional di DIY tetap berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan.

"Kami pastikan layanan operasional di DIY masih berjalan dengan baik dan siap melayani masyarakat, termasuk dalam memberikan informasi terkait gempa bumi," ujar Ardianto, Selasa (11/2).

Ardianto menyebut, efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan pada kemampuan pemantauan dan mitigasi bencana. "Efisiensi tidak mengganggu layanan operasional. Kami tetap dapat memberikan informasi secara optimal kepada ma-

sarakat," jelasnya.

Sistem peringatan dini yang akurat menjadi prioritas utama di DIY. Ardianto memastikan sistem pemantauan dan informasi gempa bumi tetap beroperasi sesuai prosedur operasional standar (SOP), dengan pemeliharaan yang tetap berjalan demi menjamin keandalan sistem.

Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Warjono juga mengonfirmasi layanan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem tetap berjalan lancar. "Efisiensi tidak berarti pengurangan layanan, tapi peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber daya," katanya.

Industri MICE terdampak

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul Andreas Supriyadi mengatakan, efisiensi anggaran dipastikan berdampak signifikan bagi industri Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) di Gunungkidul.

"Meskipun, pangsa pasar pemerintah untuk MICE di Gunungkidul tidak sebesar di Kota Yogyakarta. Namun, kontribusinya cukup signifikan mencapai hingga lebih dari 20 persen tamu yang datang ke Gunungkidul," ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (11/2).

Meskipun belum ada perhitungan pasti, efeknya sudah mulai dirasakan para pengelola MICE. Dari pendataan seluruh anggota PHRI Gunungkidul menyimpulkan, Januari-Desember tahun ini, sama sekali belum ada pemesanan MICE dari pemerintah.

"Padahal, biasanya momen seperti ini apalagi mendekati puasa seharusnya sudah ada, misalnya kegiatan buka puasa bersama atau halal bihalal," ujarnya.

Dia mencontohkan, di tempat penginapan yang dikelolanya yakni Drini Hills, biasanya dalam setahun paling tidak ada enam kali pemesanan MICE dari pemerintah. "Tahun ini satu pun tidak ada pemesanan, semuanya masih *wait and see*," ungkapnya.

Lebih lanjut Andreas menuturkan, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, PHRI se-Indonesia bakal menggelar musyawarah nasional (Munas) untuk membahas kebijakan perihal efisiensi anggaran tersebut. [adg/ha/aka/tif/abz/nei](#)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005